



RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD) KABUPATEN WAJO TAHUN 2023

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kabupaten Wajo pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	Kinerja Tahun 2022	Kinerja Tahun 2023	Laju Kinerja %
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,26	73,56	4,697
2	Angka Kemiskinan	6,57	6,73	2,435
3	Angka Pengangguran	2,54	2,1	-17,323
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,38	1,43	-39,916
5	Pendapatan Per Kapita	63.431	63.612	0,285
6	Ketimpangan Pendapatan	0,375	0,362	-3,467

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Makro diatas dapat dijelaskan masing- masing indicator adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

Menurut metodologi baru, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur melalui pendekatan tiga Dimensi dasar yaitu Dimensi kesehatan melalui Umur Harapan Hidup; Dimensi pendidikan yang terdiri dari *Harapan Lama Sekolah* dan *Rata- Rata Lama Sekolah*; dan Dimensi Hidup Layak yang dihitung dari *Pengeluaran per kapita Disesuaikan*.

Berikut komponen pembentuk IPM kabupaten Wajo selama 2 (dua) tahun terakhir:

NO	KOMPONEN	2022	2023
1	Umur Harapan Hidup	72,97	73,25
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,30	13,31
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,16	7,45
4	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp)	12,729	13,192

Sumber : Wajo Dalam Angka Triwulan 4 2022, BPS 2023

2. Angka Kemiskinan

Dalam mengukur Angka kemiskinan dalam suatu kabupaten kota digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran dari perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Indikator	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	26,75	27,54
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,86	1,34
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,21	0,43
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,57	6,73
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	375.022	402.351

Sumber : Wajo Dalam Angka Triwulan 4 2022, BPS 2023

3. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Pada Tahun 2023 angka pengangguran Terbuka pada Kabupaten Wajo cenderung menurun dimana pada tahun 2022 angka pengangguran sebesar 2,54% menurun pada tahun 2023 menjadi 2,1%.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan Perkembangan produksi barang dan jasa suatu wilayah perekonomian dari tahun t-1 ke tahun t yang diukur berdasarkan pdrb atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi mengindikasikan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -39,91 persen, hal ini diakibatkan adanya beberapa lapangan usaha banyak yang tertutup.

5. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per Kapita diukur dari dihitung berdasarkan PDRB per kapita berdasarkan Harga Berlaku (ADHB) pada tahun pelaporan dan tahun sebelumnya. Dimana **PDRB per kapita** adalah pendapatan rata-rata penduduk

yang didapat dari hasil bagi antara **PDRB** dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Pendapatan per Kapita Kabupaten Wajo cenderung meningkat sebesar 0,28 % dari 63,431 pada Tahun 2022 menjadi 63,612 pada Tahun 2023. Yang artinya dari sisi lapangan usaha 1 orang penduduk dapat menciptakan pendapatan sebesar 63,612 juta rupiah per tahun.

6. Ketimpangan Pendapatan

Salah satu ukuran ketimpangan yang digunakan adalah Gini Ratio. Nilai ini berkisar antara 0 – 1, dimana semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Berdasarkan hasil rilis dari Badan Pusat Statistik bahwa ditahun 2023 Gini Ratio Kabupaten Wajo adalah sebesar 0,362.

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian pelaksanaan kinerja urusan pelayanan dasar Kabupaten Wajo tahun 2023 memuat capaian kinerja kunci outcome sesuai yang tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

1. URUSAN PENDIDIKAN.

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian penyelenggaraan Urusan Pendidikan berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Outcome pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo sebagai berikut :

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	
		2022	2023
1	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	81,51%	87,29 %
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	88,31%	93,82 %
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	58,12%	81,61 %
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	33,44%	93,43 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo Tahun 2023

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2023 dengan realisasi belanja sebesar Rp **334.895.295.480,-** dengan program dan kegiatan unggulan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan Pendidikan Dasar.
 - b. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - d. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.
2. Program Pengembangan Kurikulum dengan kegiatan penetapan kurikulum muatan local pendidikan dasar;
3. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Wajo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sajian data terkait anak tidak mampu, anak tidak sekolah, anak putus sekolah, dan tenaga pendidik yang berkualifikasi S1 / DIV tidak terpenuhi dengan baik.
2. Sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia yang belum memadai,
3. Alokasi anggaran belum maksimal.

2. URUSAN KESEHATAN

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian penyelenggaraan Urusan Kesehatan berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Outcome pada dinas Kesehatan Kabupaten Wajo sebagai berikut :

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	
		2022	2023
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,12%	1,57 %
2	Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	50,00%	100 %
3	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	98,88 %

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	
		2022	2023
4	Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	101,61%	99,44%
5	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	101,45%	100%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	97,65%	98,97 %
7	Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	100%	100 %
8	Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	93,27%	95,95%
9	Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	86,01%	97,91%
10	Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86,28%	97,92%
11	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,24%	100%
12	Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%
13	Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	121,97%	100%
14	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Wajo Tahun 2023

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan di Kabupaten Wajo dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2023 dengan realisasi ebesar

Rp.141.189.211.687,- dengan program dan kegiatan unggulan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota
 - c. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, *dengan kegiatan :*
 - a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.
 - b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, *dengan kegiatan :*
 - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
 - b. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, *dengan kegiatan :*
 - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Wajo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Masih ada beberapa Program terkait tidak menganggarkan pelaksanaan Pelayanan Urusan Kesehatan ;
2. Masih ada ibu hamil yang belum melakukan pemeriksaan sesuai dengan jadwal dan standar pelayanan karena alasan pekerjaan;
3. P4K tidak berjalan secara maksimal;

4. Sistem Pencatatan Pelayanan melalui Aplikasi E Kohort belum berjalan maksimal;
5. Masih adanya Persalinan No Nakes dan Non Faskes;
6. Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil masih perlu dimaksimalkan secara kualitas dan kuantitas;
7. Masih adanya sasaran yang tidak berkunjung ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar.
8. Masih ada Puskesmas yang belum secara Terpadu dalam Melaksanakan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar di Sekolah;
9. Ketersediaan Buku Lansia yang tidak sesuai dengan jumlah sasaran;
10. Masih Adanya Keterlambatan Pengimputan Data di Akibatkan Oleh, Kurangnya Sarana Misalnya Laptop dan Jaringan Internet.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Outcome pada dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo sebagai berikut :

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	
		2021	2022
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS	Kabupaten Wajo termasuk dalam wilayah sungai (WS) Welennae Cendrana yang merupakan wilayah sugai strategis nasional kewenangan pemerintah pusat berdasarkan peraturan pemerintah pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 04 Tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai (WS)	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Wajo termasuk dalam wilayah sungai (WS) Welennae Cendrana yang merupakan wilayah sugai strategis nasional kewenangan pemerintah pusat berdasarkan peraturan pemerintah pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 04 Tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai (WS)	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	31,61%	69,58%

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	
		2021	2022
4	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	90,70%	90,92%
5	Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90%	92%
6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	100%	100%
7	Tingkat kemantaban jalan kabupaten/kota	49,69%	48,76%
8	Rasio tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	30,64%	35,61%
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%

Sumber : Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo tahun 2023

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Wajo Tahun 2023 Sebesar Rp 163.674.195.827 dengan program dan kegiatan unggulan adalah sebagai berikut :

1. *Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan kegiatan :*
 - a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. *Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan kegiatan :*
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
3. *Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan kegiatan :*
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. *Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan kegiatan :*

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
5. *Program Penataan Bangunan Gedung, dengan kegiatan :*
 - a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
6. *Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan :*
 - a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
7. *Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan .:*
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
8. *Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan kegiatan :*
 - a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Wajo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi terkait penerapan SPM kepada personil dari OPD/Instansi/Lembaga pelaksana belum optimal.
2. Keterbatasan anggaran Pembangunan, Peningkatan dan pemeliharaan SPAM serta Berakhirnya Program PAMSIMAS Tahun 2023.
3. Pemeliharaan sarana prasarana air minum di tingkat masyarakat belum optimal.
4. Terdapat lokasi perdesaan yang tidak memiliki sumber air minum layak.
5. Masih terdapat Lembaga Pengelola SPAM yang kinerjanya belum optimal.
6. Keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan Sarana Air Limbah Domestik.
7. Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) belum diperbaharui.
8. PraSarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) belum berfungsi optimal.
9. Pemeliharaan sarana prasarana air Limbah Domestik di tingkat masyarakat belum optimal.
10. Masih terdapat sarana air limbah di tingkat masyarakat yang belum memiliki Lembaga pengelola

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Outcome pada dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Wajo sebagai berikut :

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	
		2022	2023
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Tidak ada Relokasi ditahun 2022	Tidak ada Relokasi diTahun 2023
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	37,38%	37,36%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5,27%	7,89%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	7,03%	45,51%

Sumber : Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Wajo tahun 2023

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Wajo Tahun 2023 Sebesar Rp **8.913.787.989,-** dengan program dan kegiatan unggulan adalah sebagai berikut :

1. *Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan :*
 - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
2. *Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan :*
 - a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.
 - b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.
3. *Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan kegiatan :*
 - a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Wajo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam Penanganan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan atau relokasi program kab/kota sehingga belum semua rumah yang terkena bencana dapat tertangani.
2. Sarana dan prasarana kurang memadai dalam mendukung kelancaran kegiatan antara lain tidak tersedianya Kendaraan operasional khusus dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah belum dicapai karena adanya kendala yang dihadapi adalah belum adanya pencadangan akses lahan yang bersertifikat Penda dikhususkan bagi pembangunan rumah khusus beserta PSU (Relokasi) untuk memenuhi standar pelayanan dasar ini dan terdapat lokasi yang berada di daerah sempadan sungai yang merupakan lokasi yang perlu di relokasi namun telah diintervensi oleh dana program kotaku dalam penyediaan prasarana dan sarana dan diperkuat oleh aspek social budaya masyarakat sehingga sulit untuk melakukan relokasi.

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

A. Capaian Kinerja Makro

Capaian penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Outcome pada dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo sebagai berikut :

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	
		2022	2023
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	20%	12,77%
3	Mengukur Informasi jangkauan rawan bencana	100%	100%

4	Mengukur jangkauan layanan penceahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	52%	94,10%
5	Mengukur layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	24%	100%
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	74,55%	61,95%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	13,7 Menit	20,62 Menit

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan BPBD Kabupaten Wajo tahun 2023

B. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Wajo Tahun 2023 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wajo dengan pagu Anggaran total sebesar Rp 12.793.127.489,- dengan program dan kegiatan unggulan adalah sebagai berikut :

- Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.10.366.686.306,-**, dengan Program dan Kegiatan :
 1. *Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*, dengan kegiatan :
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.
 2. *Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran*, dengan kegiatan :
 - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan.
 - b. Inspeksi Kejadian Kebakaran
 - c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - d. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.2.426.441.183,-** dengan Program dan Kegiatan :
 1. *Program Penanggulangan Bencana*, dengan kegiatan :
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Wajo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Wajo untuk urusan ketentraman dan ketertiban umum dan pemadam dengan Permasalahan yaitu:
 1. Perlu anggaran yang besar dalam pemenuhan kebutuhan sub kebakaran.
 2. Masih kurangnya pemahaman terkait pengumpulan data, cara pemenuhan kebutuhan dan pengintegrasian ke dokumen perencanaan.
 3. Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.
 4. Masih kurangnya jumlah PPNS dalam lingkup Satpol PP.
 5. Kurangnya anggota pemadam yang bersertifikat sesuai standar kualifikasi pemadam.
 6. Kurangnya peran aktif masyarakat dalam menjaga dan memelihara trantibum serta penanganan kebakaran secara dini.
 7. Belum maksimalnya penguatan kerjasama dengan stakeholder/unit terkait
- Badan Penanggulangan Bencana untuk urusan kebencanaan dengan permasalahan yaitu :
 1. Kurangnya SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana
 2. Masih banyak aparat kebencanaan yang belum terlatih.
 3. Luasnya daerah rawan bencana di Kabupaten Wajo. Tahun 2023 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Wajo termasuk dalam kategori tinggi.
 4. Alokasi anggaran yang minim untuk Badan Penanggulangan Bencana tidak memungkinkan untuk pencapaian urusan.

6. URUSAN SOSIAL .

A. Capaian Kinerja Makro

Capaian penyelenggaraan Urusan Sosial berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Outcome pada dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Wajo sebagai berikut :

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	
		2022	2023
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	9,63%	38,66%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1,03%	100%

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Wajo tahun 2023

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan realisasi belanja sebesar Rp **8.231.665.315,-** dengan program dan kegiatan unggulan adalah sebagai berikut :

1. *Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan :*
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
2. *Program Rehabilitasi Sosial , dengan kegiatan :*
 - a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti.
3. *Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan :*
 - a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
4. *Program Penanganan Bencana, dengan kegiatan :*
 - a. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota.
 - b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
5. *Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan kegiatan :*
 - a. *Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.*

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kabupaten Wajo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perlu anggaran yang besar dalam pemenuhan kebutuhan SPM khususnya pada bidang Sosial.
2. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani;
3. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Kabupaten Wajo berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 2,4827 dan status kinerja Rendah.

2. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Nomor 30.B./LHP/XIX/05/2023, Kabupaten Wajo berhasil mendapatkan Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 yang berarti bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Unaudited) Tahun 2023 Realisasi Pendapatan Kabupaten Wajo Tahun 2023 Mencapai sebesar Rp. 1.484.678.085.678,75 dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 mencapai Rp. 1.441.653.031.881,60,-

Secara rinci , rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023
1	2	3	4	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.499.566.680.226	1.484.678.085.678,75	99,01
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175.181.792.764	187.742.241.120,87	107,17
4.1.01	Pajak Daerah	51.098.500.000	55.211.692.679,00	108,05
4.1.02	Retribusi Daerah	18.936.663.364	17.787.005.343,00	93,93
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.000.000.000	17.100.236.523,00	85,50
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	85.146.629.400	97.643.306.575,87	114,68
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	175.181.792.764	187.742.241.120,87	107,17
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.321.625.310.462	1.295.794.320.397,88	98,05
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.077.726.947.851	1.048.627.742.316,00	97,30
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	42.113.728.436	47.269.549.235,00	112,24
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	703.565.659.000	712.384.708.733,00	101,25
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	127.300.312.000	125.265.725.567,00	98,40
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	204.747.248.415	163.707.758.781,00	79,96
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.077.726.947.851	1.048.627.742.316,00	97,30
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	31.670.716.000	31.670.716.000,00	100,00
4.2.01.05	Dana Desa	119.082.791.000	119.082.791.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAI	150.753.507.000	150.753.507.000,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	93.144.855.611	96.413.071.081,88	103,51
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	75.704.855.611	90.591.355.269,88	119,66
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	17.440.000.000	5.821.715.812,00	33,38
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	93.144.855.611	96.413.071.081,88	103,51
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.321.625.310.462	1.295.794.320.397,88	98,05
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.759.577.000	1.141.524.160,00	41,37
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.759.577.000	1.141.524.160,00	41,37
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.759.577.000	1.141.524.160,00	41,37
	JUMLAH PENDAPATAN	1.499.566.680.226	1.484.678.085.678,75	99,01
5	BELANJA DAERAH	1.583.814.351.117	1.441.653.031.881,60	91,02
5.1	BELANJA OPERASI	1.093.221.523.534	985.562.692.726,60	90,15
5.1.01	Belanja Pegawai	635.895.499.017	572.095.315.313,00	89,97
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.256.480.599	352.859.677.706,60	91,12
5.1.03	Belanja Bunga	2.182.305.743	2.182.305.740,00	100,00
5.1.04	Belanja Subsidi	500.000.000	148.561.085,00	29,71
5.1.05	Belanja Hibah	65.952.238.175	56.906.832.882,00	86,28
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.435.000.000	1.370.000.000,00	95,47
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.093.221.523.534	985.562.692.726,60	90,15

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023
1	2	3	4	
5.2	BELANJA MODAL	282.297.884.647	255.175.680.456,00	90,39
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.697.430.000	1.688.577.000,00	35,95
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.804.630.498	27.254.702.311,00	78,31
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.917.304.371	70.333.527.191,00	91,44
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.855.426.202	153.300.248.508,00	95,30
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.924.093.576	2.500.625.446,00	50,78
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	99.000.000	98.000.000,00	98,99
	JUMLAH BELANJA MODAL	282.297.884.647	255.175.680.456,00	90,39
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.373.319.600	1.681.377.850,00	26,38
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.373.319.600	1.681.377.850,00	26,38
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	6.373.319.600	1.681.377.850,00	26,38
5.4	BELANJA TRANSFER	201.921.623.336	199.233.280.849,00	98,67
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupa	5.139.023.636	4.649.358.900,00	90,47
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pe	1.345.826.800	1.261.619.500,00	93,74
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provins	25.000.000	0	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/K	195.411.772.900	193.322.302.449,00	98,93
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	201.921.623.336	199.233.280.849,00	98,67
	JUMLAH BELANJA	1.583.814.351.117	1.441.653.031.881,60	91,02
	SURPLUS/DEFISIT	(84.247.670.891)	43.025.053.797,15	(51,07)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	84.247.670.890	85.747.670.890,72	101,78
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	120.295.595.418	120.295.595.418,72	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	120.295.595.418	120.295.595.418,72	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	120.295.595.418	120.295.595.418,72	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.047.924.528	34.547.924.528,00	95,84
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.500.000.000	5.000.000.000,00	76,92
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	29.547.924.528	29.547.924.528,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.047.924.528	34.547.924.528,00	95,84
	PEMBIAYAAN NETTO	84.247.670.890	85.747.670.890,72	101,78
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(0)	128.772.724.687,87	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo (Unaudited)

5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Kabupaten Wajo memiliki inovasi daerah sebagai berikut:

NO	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
1	Puskesmas Keera	Masyarakat Keera Peduli Disabilitas (Masker Pelita)	Pelayanan Publik
2	Dinas Kesehatan	Gerakan Wajo Cari Jentik (GO CANTIK)	Pelayanan Publik
3	Bappelitbangda	Pusat Informasi Perencanaan Berbasis NIK (PINISI)	Tata Kelola Pemerintahan
4	Inspektorat	Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah (SISWASPADA)	Tata Kelola Pemerintahan
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Online Administrasi Kependudukan Melalui Telegram (PENTAGRAM)	Pelayanan Publik
6	Kecamatan Tempe	Layanan Administrasi Kecamatan Terintegrasi (LAKTASI)	Pelayanan Publik
7	Bappelitbangda	Pusat Informasi Perencanaan Berbasis Peta (PANRITA)	Tata Kelola Pemerintahan
8	Dinas Kesehatan	OTO DOTTORO	Pelayanan Publik
9	SMPNS Sengkang	Pemanfaatan Aplikasi Pembelajaran dan Penilaian Berbasis Android Untuk Siswa Terbuka (MATA SILASRI TERBUKA)	Pelayanan Publik
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Satuan Tugas Kependudukan Penduduk Administrasi Rentan (SATGAS ADMINDUK PETAN)	Pelayanan Publik
11	Dinas Perikanan	Tangkap Ikan Tokke Jadikan Baha Layak (TIKTOK JABLAY)	Inovasi Lainnya
12	SMA 11 Wajo	Pembasmi Kecoa Ramah Lingkungan (BROMICOA)	Inovasi Lainnya
13	SMA 11 Wajo	Bioarang Hemat Energi Ramah Lingkungan dari Kombinasi Limbah Bonggol Pisang dan Ampas Tebu (BOPIAT)	Inovasi Lainnya
14	SMA 11 Wajo	Peraga Fisika Moman Inersia (MOM SIA)	Inovasi Lainnya
15	SMA 11 Wajo	Black Box Media Alternatif Pengelola Sumber Daya Perikanan Berwawasan Lingkungan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Inovasi Lainnya
16	Sekretariat DPRD	Aplikasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terintegrasi (ADE'NA)	Inovasi Lainnya

17	Dinas PMD	Bumdes Mart	Inovasi Lainnya
18	UNIPRIMA	Inovasi Smart Farming Model Pertanian Terapung (MOTERA), Solusi Pemenuhan Pangan di Daerah banjir	Inovasi Lainnya
19	UNIPRIMA	Konsep digitalisasi rumah inovasi produk pertanian dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat desa Salontenna Kec. Sabbangparu	Inovasi Lainnya
20	UNIPRIMA	Desai Prototype Lapmpu Panel Surya sebagai alat pengendali hama tanaman padi	Inovasi Lainnya
21	UNIPRIMA	Perman Sapi	Inovasi Lainnya
22	SMA 11 Wajo	Fitocegon Analisis tanaman akuatik danau tempe sebagai Fitoremediasi untuk menghadapi industry 4.0	Inovasi Lainnya
23	Dinas Kesehatan	Perbanyak makan ikan gabus untuk pencegahan Stunting (PAK GANTENG)	Inovasi Lainnya
24	FIS UNIPRIMA	WA'EKO ber Sutra (Pewarnaan Echoprint Pada Sutra)	Inovasi Lainnya
25	Puskesmas Keera	Jemari Indah Siap Siaga (Jemput dasn antar ibu bersalin dari ke rumah dengan aplikasi alarm persalinan siap antar jaga)	Pelayanan Publik
26	Puskesmas LIU	SI BAPER MANTAP (aplikasi berbasis paperless manajemen data puskesmas)	Pelayanan Publik
27	Bappletitbangda	MAHARDIKA (Mengharmonisasikan kinerja individu dengan kinerja organisasi melalui dialog kinerja)	Tata Kelola Pemerintahan
28	UPT SMA 13 Wajo	Rider MOMSIA (Reading Inovasi Demontrasi Elanorasi dan Refleksi Momen Inersia)	Inovasi Lainnya
29	Sengkang Medical Centre	SEHATI (Sehat dirumah layanan homercare di Kabupaten Wajo)	Pelayanan Publik
30	Pt Wajo Amanah Multimedia	SI MIA (Sistem Integrated Mobile Adversing)	Inovasi Lainnya
31	Dinas Kesehatan	WANGI SAKURA (Wajo Tanggulasi Hipertensi dengan sadar ukur tekanan darah)	Inovasi Lainnya

32	Puskesmas LIU	SIPANTER (Sistem Pelayanan Maternal)	Pelayanan Publik
33	FIP UNIPRIMA	UPAYA PELESTARIAN BIDAYA MAQCACCA SEBAGAI STAR (South Celebes Culture Playing Card) dalam merawat memori kolektif kebudayaan anak-anak di kota sengkang Kab. Wajo	Inovasi Lainnya
34	Puskesmas LIU	TEBAKAN JIWA (TEMukan Obati dan pulihkan penderita jiwa	Pelayanan Publik
35	Puskesmas LIU	Gemindu (Gerakan Mobile Posbhindu)	Pelayanan Publik
36	Kecamatan Tempe	TEMPE BERI TAHU	Pelayanan Publik

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Tahun 2023